



## TATA KOTA PAREPARE PERIODE KOLONIAL BELANDA

### *Urban Planning of Parepare Dutch Colonial Period*

Muhajir<sup>1</sup>, Muhammad Nur<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Peneliti freelance

Yayasan Sulisa Matra Bangsa, Makassar, Indonesia  
muhajir015@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Arkeologi, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar, Indonesia  
mnur@unhas.ac.id

Naskah diterima: 10/05/2019; direvisi: 17/05-01/07/2019; disetujui: 04/07/2019

Publikasi ejurnal: 30/06/2019

#### **Abstract**

*The focus of this research is the port city of Parepare in the Dutch Colonial period. The problem posed is how the form of urban planning and the factors that influence the form of the city of Parepare in the Dutch Colonial period. The method used is the determination of the dimensions of Colonial buildings based on inscriptions, texts and interviews. Mapping of building layout and road network as well as analysis of building functions, urban space organizations, and analysis of the factors forming city spatial planning are also carried out. The results of the study indicate that the city planning of Parepare consists of three zones. The first zone is the core of the city occupied by the Dutch government as the center of government. The second zone is the Chinatown area, intended for economic activities. The third zone is for indigenous settlements. The shape of the city extends from north to south following the coastline. The road network in the city center has a grid pattern. The dominant factor affecting the shape of the city of Parepare is geo-political and security factors, to maintain the conduciveness of the western coastal region of South Sulawesi.*

**Keyword:** Parepare, afdeling, urban planning, grid, Dutch.

#### **Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah Kota pelabuhan Parepare pada periode Kolonial Belanda. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penentuan dimensi bangunan Kolonial berdasarkan prasasti, naskah dan hasil wawancara. Pemetaan tata letak bangunan dan jaringan jalan serta analisis fungsi bangunan, organisasi ruang kota, dan analisis faktor pembentuk tata ruang kota juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kota Parepare terdiri dari tiga zona. Zona pertama merupakan inti kota ditempati oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan. Zona kedua adalah kawasan pecinan, diperuntukkan untuk kegiatan perekonomian. Zona ketiga diperuntukkan untuk pemukiman pribumi. Bentuk kota memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Jaringan jalan pada pusat kota berpola grid. Faktor yang dominan mempengaruhi bentuk kota Parepare adalah faktor geo-politik dan keamanan, untuk menjaga kondusifnya wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** Parepare, afdeling, tata kota, grid, Belanda.

#### **PENDAHULUAN**

Paling tidak, ada tujuh penelitian tentang tata kota periode Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan sehingga fase perkembangan dan format beberapa kota pada periode tersebut memiliki gambaran.

Tentang Kota Makassar, penelitian Syahrudin Mansyur (2002) berhasil mengungkap pertumbuhan Kota Makassar pada Akhir Abad XVII hingga Awal abad XX yang dibaginya menjadi tiga fase. Pertumbuhan keruangan Kota Makassar

masa Kolonial tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat (Mansyur, 2002). Penelitian Irfan Mahmud (2003) tentang Struktur Kota Palopo Abad XVII – XIX juga berhasil menjelaskan bahwa sejak masa pendudukan Belanda pada tahun 1920, terjadi pertumbuhan struktur kota secara signifikan dengan dibangunnya pasar dan rumah jabatan pada alun-alun istana kerajaan. Selain itu, istana kerajaan yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Di sisi barat istana didirikan sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja. Di bagian timur dibangun pelabuhan dan beberapa gudang. Data tersebut menggambarkan bahwa perubahan wajah Kota Palopo disebabkan oleh kebijakan pemerintah Belanda (Mahmud, 2003).

Basran juga berhasil mengungkap Struktur Kota Jeneponto Lama Tahun 1906-1945. Peran Pemerintah Belanda sangat besar dalam penciptaan pola keruangan kota Jeneponto Lama yang terlihat pada bagian pusat kota yang didominasi oleh bangunan-bangunan Kolonial yang difungsikan sebagai ruang pemerintahan dan pemukiman Belanda. Di bagian luar pusat kota terdapat pasar dan kios-kios pertokoan komunitas China. Di zona lain, terdapat kampung-kampung (Kassi-kassi, Tarrusang, Bontobonto, Tamarunang dan Tanru Sampe) yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, petani dan penambang pasir (Burhan, 2010). Sedangkan di Kota Watampone, pertumbuhan kotanya terbagi menjadi tiga periode perkembangan sejak Periode Pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri sampai Periode Pemerintahan La Mappanyukki (Nurfajriyani, 2007).

Sebagai kota *Onderafdeling*, Kota Maros juga mengalami pertumbuhan dari periode Islam sampai periode Kolonial. Hasil penelitian Muhammad Nur dan Hasanuddin menjelaskan bahwa pertumbuhan kota Maros dimulai dari tata kota Islam Kassikebo, kemudian tata kota

kolonial Belanda dan kota Maros pada periode Jepang. Sebelum kota Kolonial Belanda di wilayah Turikale, pusat kota Maros berada di wilayah Kassikebo yang dicirikan oleh sebuah sistem tata kota Islam yang teosentrik dengan keletakan masjid Kassikebo di tengah pemukiman (Mulyadi & Nur, 2017; Nur & Hasanuddin, 2014, 2017). Di Selayar, tata ruang kota periode Kolonial telah terencana dengan baik, ditunjukkan oleh pola sebaran pemukiman dan jalan yang memanjang dari utara ke selatan, mengikuti morfologi bentang lahan dan arah garis pantai. Pembagian fungsi ruang yang letaknya saling berdekatan telah memudahkan mobilitas masyarakatnya (Lendrawati, 2010). Penelitian terakhir dilakukan oleh Muhajir tentang Tata Kota Parepare Pada Masa Kolonial Belanda juga menghasilkan beberapa kesimpulan tentang unsur pembentuk dan tata kota Parepare. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi Muhajir pada aspek keruangan dan komponen kota seperti pelabuhan, rumah sakit, sarana pendidikan dan makam (Muhajir, 2017).

Penelitian yang telah dilakukan tentang kota telah memberikan gambaran bahwa penataan kota-kota periode Kolonial di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yang mempertimbangkan bentang alam, situasi politik, topografi dan kondisi sosial masyarakat (Burhan, 2010; Lendrawati, 2010, p. 2; Mahmud, 2003, p. 65; Mansyur, 2002, p. 3; Mulyadi & Nur, 2017; Nur & Hasanuddin, 2014, 2017; Nurfajriyani, 2007, p. 3) Walaupun demikian, hasil penelitian di atas belum dapat dianggap mewakili penjelasan menyeluruh tentang kota-kota di Sulawesi Selatan pada periode Kolonial, baik yang berstatus *afdeling* maupun *onderafdeling*. Untuk menambah pemahaman kita tentang dinamika pertumbuhan kota periode Kolonial di Sulawesi Selatan, penelitian ini akan difokuskan pada Kota Parepare yang menyandang status sebagai kota *afdeling*

sejak tahun 1911 (Poelinggomang, 2004, pp. 83–84) yang juga merupakan kota pelabuhan. Adapun detail permasalahan yang diajukan adalah bagaimana desain kota Parepare pada periode Kolonial Belanda sebagai bagian terintegrasi dalam sistem kota kolonial Belanda di Pulau Sulawesi. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam penemuan bentuk Kota Kolonial Parepare dan akan memperkaya kajian arkeologi kota periode Kolonial di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan referensi mengenai sejarah Kota Parepare berupa naskah, peta, foto bangunan dan beberapa hasil penelitian sejarah dan arkeologi di perpustakaan, internet, BPCB Makassar dan Badan Arsip Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu dilakukan pengumpulan data komponen kota seperti bangunan, sarana jalan, lapangan dan fitur-fitur sejarah di Kota Parepare. Pada tahap pengumpulan data ini, juga dilakukan wawancara. Dalam penentuan komponen kota Parepare periode Kolonial, dilakukan verifikasi data dengan cara setiap komponen kota harus terkonfirmasi oleh data wawancara, naskah, foto atau kesimpulan penelitian sebelumnya. Data komponen kota yang telah diperoleh baik data pustaka maupun data bangunan dikategorikan berdasarkan fungsi untuk melihat hubungan fungsionalnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan peta keletakan lokasi bangunan menggunakan software Arcgis untuk melihat lokasi bangunan dengan mengacu pada peta tahun 1929 dan photo udara tentara Sekutu yang dirangkum dalam “Special Report Allied Geographical Section SWPA Special Report no. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945” (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Setelah itu dilakukan analisis morfologi kota dan analisis keruangan. Analisis morfologi kota digunakan untuk mengetahui komponen

pembentuk ruang kota dan bentuk kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Selanjutnya analisis keruangan untuk mengetahui pembagian dan pemanfaatan ruang di Kota Parepare. Analisis lingkungan digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan terhadap ruang perkotaan. Data lingkungan yang telah didapatkan akan digunakan untuk mengkonfirmasi keterkaitan antar temuan. Hasil dari analisis lingkungan adalah tingkat pengaruh lingkungan terhadap tata ruang Kota Parepare. Tahapan metodologis terakhir adalah generealisasi, tahap pencarian gejala umum tentang komponen kota yang membentuk morfologi Kota Parepare periode Kolonial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Parepare: Aspek Geografi dan Sejarah**

Kota Parepare berada di bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan menempati posisi silang jalur transportasi darat utara-selatan dan timur-barat. Selain itu, Kota Parepare juga berada di pesisir Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan sehingga arus lalu lintas antar pulau menjadi salah satu layanan sarana transportasi di kota ini. Secara geografis Kota Parepare terletak di antara 30° 57' 39" – 40° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 36' 24" – 119° 34' 40" Bujur Timur. Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kab. Barru di sebelah selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat. Secara keseluruhan luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,21 % dari total luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare terdiri dari empat kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa (*Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015*, 2015).

Topografi Kota Parepare memiliki permukaan yang bervariasi, terdiri dari 85%

wilayah perbukitan, bergelombang dan bergunung serta sekitar 15% dengan topografi datar yang berada di bagian barat yang berbatasan dengan pesisir Selat Makassar dan merupakan pusat kegiatan penduduk kota. Sedangkan wilayah perbukitan berada di bagian timur dengan puncak ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan di bagian selatan terdapat aliran Sungai Sumpang Minangae (*Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015, 2015*).

Pada awal abad ke-20, Kota Parepare merupakan bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Verklaring*) oleh *Tu'mailalang Towa* dan anggota Dewan *Bate Salapang* menandai periode itu. Pada tahun 1906 Sulawesi Selatan secara keseluruhan berada langsung di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Poelinggomang, 2004, p. 83). Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Wilayah itu kemudian

dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*afdeling*) yaitu Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Luwu, Mandar dan Buton serta Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*) yang secara resmi berlaku pada tahun 1911 (Poelinggomang, 2004, pp. 83–84). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda yaitu H.N.A. Swart pada tanggal 31 Desember 1906 pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah administratif di Sulawesi Selatan dan daerah taklukan menjadi tujuh bagian wilayah pemerintahan *afdeling*, salah satunya yaitu wilayah *afdeling* Parepare (Poelinggomang, 2004, p. 12).

Dijadikannya Parepare menjadi sebuah wilayah *afdeling*, maka wilayah Parepare kemudian menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah-wilayah bawahannya dan dikepalai oleh seorang Asisten Residen (*Assisten Resident*) sebagai pemimpin pemerintahan untuk wilayah *afdeling* dan seorang kontrolir (*controleur*) sebagai pemimpin cabang pemerintahan atau yang disebut *onderafdeling* (Poelinggomang, 2004, p. 15). Wilayah pemerintahan Sulawesi Selatan dan daerah bawahannya, secara politik dikategorikan dalam tiga bentuk. Pertama adalah daerah yang berada

**Tabel 1.** Data komponen kota Makassar dan fungsinya yang masih dapat dijumpai sekarang.

No.	Nama Bangunan	Fungsi Bangunan	Kelurahan
1.	Kantor Kontrolir	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Sabbang
2.	Kantor Tentara Belanda	Pemerintahan dan Pertahanan	Ujung Sabbang
3.	Kantor Kejaksaan	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Sabbang
4.	Tangsi Militer 1 dan 2	Tempat Tinggal dan Keamanan	Ujung Sabbang
5.	Sekolah China	Pendidikan	Ujung Sabbang
6.	Rumah Kodok (Queenshead) 1-7	Tempat tinggal	Ujung Sabbang
7.	Sumur 1 & 2	Tempat Penampungan	Ujung Sabbang
8.	Hotel Siswa	Tempat tinggal	Ujung Sabbang
9.	Bioskop	Hiburan	Ujung Sabbang
10.	Pecinan	Tempat tinggal dan perdagangan	Ujung Sabbang
11.	Penjara	Pemerintahan dan Keamanan	Ujung Bulu
12.	Rumah Sakit	Kesehatan	Ujung Bulu
13.	Rumah Dinas Kontrolir	Tempat tinggal	Ujung Bulu
14.	Tangki air	Tempat Penampungan	Ujung Bulu
15.	Penampungan Bahan Bakar	Tempat Penampungan	Ujung Bulu
16.	Dermaga Belanda	Pelabuhan	Mallusetasi
17.	Rumah Jabatan Danrem	Tempat tinggal	Mallusetasi
18.	Gudang Amunisi	Pemerintahan dan keamanan	Cappa Galung

dalam kekuasaan langsung. Wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya yaitu Distrik Makassar, distrik-distrik bagian utara yang meliputi daerah Maros, Pangkajene serta di bagian selatan yaitu Distrik Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Kedua adalah daerah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung, wilayah ini

disebut “kerajaan pinjaman”. Pelaksanaan pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang dikuasai langsung itu dipinjamkan kepada penguasa lokal. Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Tallo, Tanete, Parepare, Wajo dan Bone. Ketiga yaitu kerajaan sekutu yang dimana kerajaan ini dipandang merdeka dan berdaulat, namun menempatkan penguasa



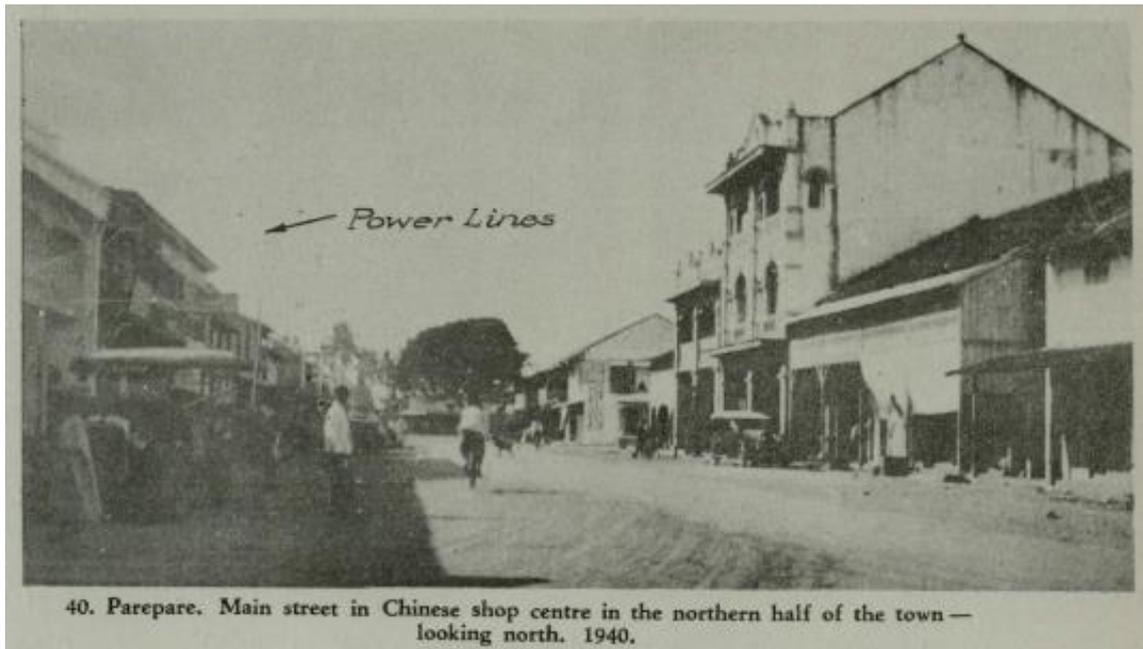
**Gambar 1.** Beberapa bangunan kolonial dari kota Parepare. Bangunan Rumah Dinas Kontrolir, tampak dari arah barat (A). Bangunan Kantor Kejaksaan tampak dari arah barat (B). Kantor tentara Belanda, tampak dari arah utara (C). Bangunan bekas Kantor Kontrolir (sekarang Kantor AJENREM 142), tampak dari arah barat (D). Bangunan Tangsi Militer 2, tampak dari arah selatan (E). Bangunan Gudang Amunisi, tampak dari arah timur (F) (Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).



**Gambar 2.** Beberapa bukti bangunan lain. Bangunan rumah Jabatan Danrem, tampak dari arah barat (A). Bangunan rumah Kodok 3, tampak dari arah barat (B). Bangunan Rumah Kodok 5, tampak dari arah selatan (C). Bangunan Rumah Kodok 6, tampak dari arah utara (D). Sekolah China, tampak dari arah selatan (F). Bangunan Gereja Immanuel, tampak dari arah selatan (G) dan Prasastinya (H)(Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).

kolonial sebagai pelindung dan perantara. Pengakuan kedudukan pihak pemerintah

kolonial itu memberikan kekuatan bagi pemerintah Kolonial Belanda sebagai posisi



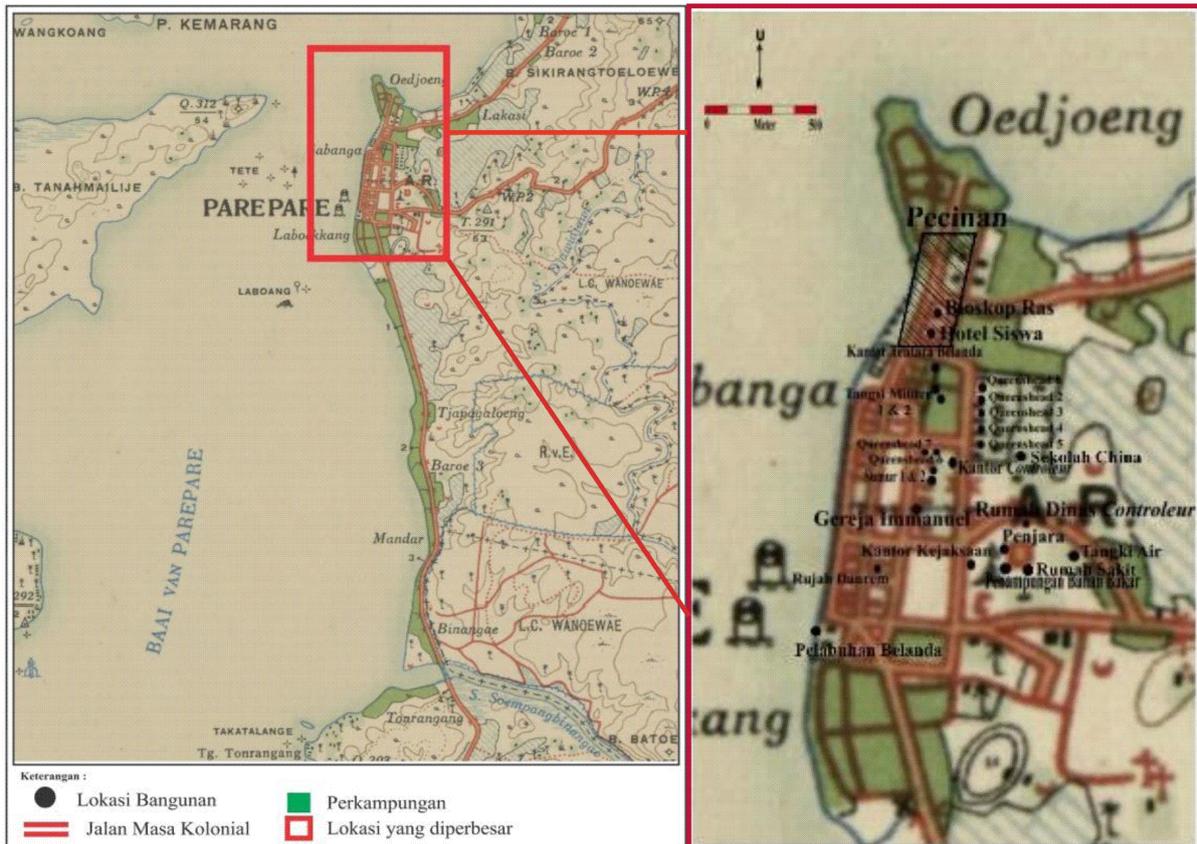
**Gambar 3.** Hotel Siswa yang berlantai tiga dan Kawasan Pecinan pada tahun 1940. Kawasan ini masih ada hingga sekarang (**Sumber:** Special Report No. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945).



**Gambar 4.** Penampungan bahan bakar (**Sumber:** Dokumentasi Muhajir, 2017)

pelindung terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Wilayah tersebut yaitu Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Toraja dan kerajaan-kerajaan kelompok Ajatapparang, kerajaan di Mandar, kerajaan kelompok Mallusetasi (Soreang, Bojo, Nepo dan Palanro) (Poelinggomang & Mappangara, 2005, p. 16).

Wilayah *afdeling* Parepare berdasarkan Surat No. 476 Tahun 1917 mengatur wilayah *afdeling* Parepare dengan menempatkan pusat pemerintahan Belanda di kota ini yang membawahi lima wilayah pemerintahan *onderafdeling* dan dipimpin oleh seorang kontrolir (*controleur*). Di samping adanya pemimpin dari pemerintah



**Gambar 5.** Sebaran bangunan dan jaringan jalan Kota Parepare 1929 (Sumber: [http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q\\_searchfiled=parepare](http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q_searchfiled=parepare), Dimodifikasi ulang oleh Muhajir, 2017)

Hindia Belanda, struktur pemerintahan di Kota Parepare juga dibantu oleh aparat pemerintah Raja-Raja Bugis, yaitu *Arung Barru* di Barru, *Addatuang Sidenreng* di Sidenreng Rappang, *Arung Enrekang* di Enrekang, *Addatuang Sawitto* di Pinrang sedangkan di Parepare sendiri berkududukan *Arung Mallusetasi* sebagai pejabat pribumi (Poelinggomang & Mappangara, 2005, p. 17). Lima wilayah *afdeling* Parepare adalah *onderafdeling* Parepare, *onderafdeling* Pinrang, *onderafdeling* Sidenreng Rappang, *onderafdeling* Barru dan *onderafdeling* Enrekang.

## 2. Komponen Kota Parepare

Komponen kota yang kami maksudkan dalam artikel ini adalah bangunan, fitur dan fasilitas jalan yang ditentukan berdasarkan hasil konfirmasi data sejarah, artefak dan hasil wawancara. Data

komponen Kota Makassar beserta fungsinya yang masih dapat dijumpai sekarang (Tabel 1, gambar 1, 2, 3 dan 4).

Konsentrasi bangunan berada di Kelurahan Ujung Sabbang yang menjadi pusat aktivitas Pemerintah Belanda (gambar 5). Inggiran jaringan jalan pusat Kota Parepare periode Kolonial dan masih seperti itu ketika penelitian ini dilakukan. Jaringan jalan periode Kolonial Parepare tahun 1929 tampak didesain berpola grid dengan tiga jalur jalan keluar kota, masing-masing ke Pinrang, Sidenreng dan Barru. Dari jaringan jalan, jelas tergambar bahwa akses darat untuk melintasi Kota Kolonial Parepare dari segala arah harus melewati jantung Kota Parepare. Jaringan jalan juga menunjukkan bahwa tidak ada blok jalan dan persimpangan jalan pada areal pemukiman pribumi. Pemukiman tampak hanya memanjang mengikuti alur jalan.

### 3. Diskusi: Bentuk Kota Parepare

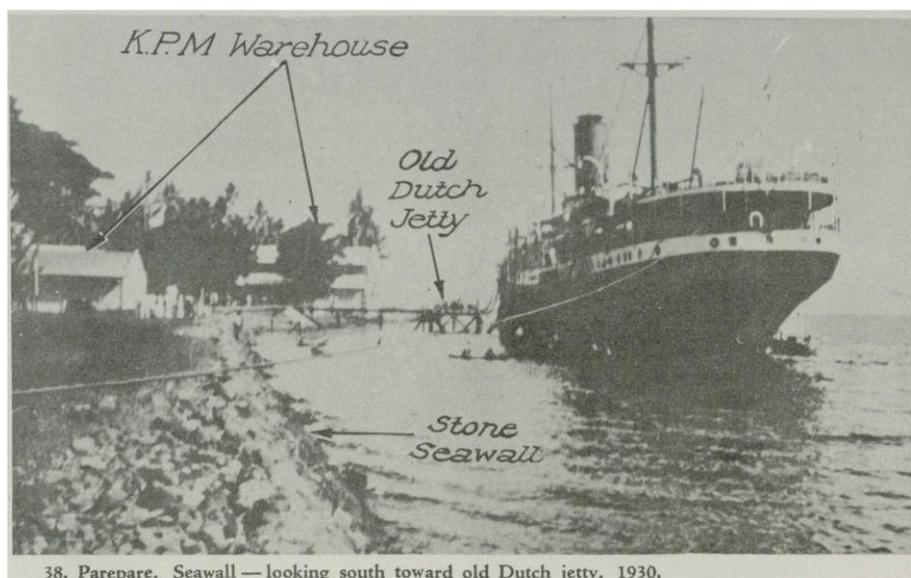
Pusat Kota Parepare periode Kolonial berada di Teluk Parepare. Berdasarkan sensus tahun 1930, Kota Parepare berpenduduk 6.263, terdiri dari 5.599 penduduk pribumi, 125 orang Eropa, 385 orang China, dan 164 pendatang dari Asia. Sebelum Jepang menguasai, Kota Parepare dikenal sebagai kota pelabuhan yang mengeksport komoditas seperti beras, jagung, ikan kering dan kopra (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Berdasarkan peranannya sebagai kota pelabuhan (gambar 6), diskusi tentang Kota Parepare dalam artikel ini akan memberikan gambaran berbeda dibandingkan kota-kota lain di Sulawesi Selatan pada periode Kolonial Belanda.

Dari kajian fungsi dan keletakan bangunan, tata Kota Parepare periode Kolonial Belanda dibedakan menjadi tiga kategori ruang kota, pertama adalah zona inti kota, merupakan daerah pusat kegiatan yang dihuni oleh para penguasa dalam hal ini pemerintah Kolonial Belanda. Kedua adalah zona bagian luar dari inti kota, didiami oleh komunitas pedagang yang umumnya China,

dan yang ketiga adalah zona pemukiman pribumi (gambar 5).

Zona inti kota dicirikan oleh konsentrasi bangunan Kolonial di kawasan sekitar Kelurahan Ujung Sabbang dan Ujung Bulu. Sejumlah bangunan vital seperti bangunan kantor kontrolir, kantor tentara Belanda, kantor kejaksaan dan bangunan penjara yang difungsikan sebagai aktivitas pemerintahan dan keamanan berada di dua kelurahan ini. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah tinggal prajurit Belanda dan tangsi militer yang difungsikan sebagai tempat tinggal pasukan Belanda. Fasilitas lain di kawasan inti kota adalah dermaga Belanda yang telah ada pada tahun 1930, dan masjid, pasar, pabrik penggilingan padi juga tampak dalam photo udara Tentara Sekutu pada tahun 1944 (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945).

Di bagian tenggara dari bangunan-bangunan yang telah disebutkan di atas, didirikan bangunan Rumah Sakit dan kediaman kontrolir. Rumah kontrolir berada pada ketinggian 14 mdpl atau lokasinya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan lain agar segala aktivitas anggotanya dapat dipantau dan diawasi



38. Parepare. Seawall — looking south toward old Dutch jetty. 1930.

**Gambar 6.** Kapal yang bersandar di pelabuhan Belanda Parepare tahun 1930 (Sumber: Special Report No. 80, Makassar SW Celebes Dates 24 Aug 1945).

dengan baik. Selain itu, di wilayah ini juga dibangun fasilitas keagamaan seperti gereja dan fasilitas pendidikan seperti sekolah China. Makam para bangsawan (Kompleks Makam Datu Lacincing) juga terletak di zona inti kota, menunjukkan bahwa kompleks makam ini merupakan lokasi yang memang sudah ada ketika kota Kolonial Parepare didesain. Dalam kasus Sulaesi Selatan, kompleks makam raja memang selalu berada di tengah pemukiman Belanda karena keberadaannya memang sudah ada sebelum suatu kota kolonial didesain dan menjadi identitas dari kerajaan tersebut (Nur, 2018).

Berdasarkan studi pustaka yang penulis dilakukan bahwa di Kelurahan Mallusetasi sekarang (masih dalam kawasan inti kota Parepare), dibangun beberapa sekolah di antaranya HIS (*Holland Indishe School*), HCS (*Holland Chineesche School*), *Vervolg School*, *Volks School* dan *Europese Lagere School*. Bangunan-bangunan sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebangsaan Belanda. Namun, dari hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, semua bangunan sekolah tersebut telah dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru. Satu-satunya sekolah periode Kolonial yang masih bertahan hingga sekarang adalah Sekolah China yang terletak di jalan Pettanarajeng (sekarang dijadikan areal perkantoran Dinas pendidikan Nasional Kota Parepare).

Di zona kedua, pada bagian luar dari inti kota ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar. Dari hasil observasi lapangan di Kota Parepare tidak ditemukan pasar yang telah ada pada masa pra-Kolonial maupun masa Kolonial. Namun dari hasil wawancara dengan bapak Rafael bahwa di jalan Baso Dg. Panompo dan jalan Sulawesi sekarang merupakan kawasan pecinan yang dihuni orang-orang China yang sebagian dari mereka merupakan pedagang yang menjual berbagai keperluan sehari-hari. Informasi tersebut sesuai dengan photo yang dicantumkan Tentara Sekutu dalam

laporannya (“Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945,” 1945). Di Kota Parepare, kegiatan perekonomian berupa kios-kios pertokoan dan warung-warung kopi didominasi oleh orang-orang China. Selain itu, di zona ini terdapat bioskop dan hotel yang juga digunakan sebagai aktivitas perekonomian.

Seperti kota lain di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Kolonial tidak terlepas dari peranan orang-orang China. Berdasarkan hasil kajiannya, Handinoto menyatakan bahwa dalam tata ruang kota khususnya kota Kolonial di Indonesia, daerah pecinan sering menjadi pusat perkembangan karena daerah tersebut merupakan daerah perdagangan yang ramai. Orang-orang China juga berperan sebagai pedagang perantara dan pedagang eceran. Karena alasan ini pula daerah pecinan sering terletak di antara daerah orang pribumi dan daerah orang Eropa (*Europeesche Wijk*). Secara strategis, kawasan pecinan ini juga berfungsi sebagai daerah penyangga bagi daerah orang Eropa jika sewaktu-waktu terjadi perlawanan orang-orang pribumi terhadap orang-orang Belanda (Handinoto, 2012, p. 359). Hal ini terlihat pada Kota Parepare dimana zona kedua ditempati oleh toko-toko orang-orang China yang jelas menandakan areal aktivitas perekonomian. Keberadaan zona perdagangan di Kota Parepare juga sekaligus mencirikan kota ini sebagai kota perdagangan di wilayah Ajattappareng, mengingat lalu lintas barang dan manusia yang melewati Kota Parepare memiliki intensitas tinggi, baik jalur darat maupun laut.

Zona pertama dan kedua merupakan daerah dengan akses jalan paling banyak. Jaringan jalan tersebut digunakan sebagai akses menuju ke wilayah lain untuk kelancaran aktivitas masyarakatnya. Selain itu, dibuat tiga jaringan jalan utama yang menuju ke wilayah Barru, Pinrang dan Sidrap untuk kelancaran mobilitas di kota-kota lainnya. Rute-rute transportasi dari segala penjuru memusat ke zona pertama

dan zona kedua yang merupakan zona dengan derajat aksesibilitas paling tinggi (lihat peta no. 3), zona ini juga disebut sebagai “*the area of dominance*” (Yunus, 2000, p. 7).

Di zona ketiga, ditempati oleh pemukiman penduduk yang berada di pinggiran pusat kota. Pemerintah Belanda menempatkan penduduk pribumi di luar zona inti kota agar segala aktivitas pemerintahan di pusat kota tidak terganggu. Pemukiman tersebut dihuni oleh penduduk pribumi dengan spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda. Di sebelah utara terdapat Kampung Ujung. Sesuai namanya, wilayah ini berada di paling ujung yang sekarang bernama Cappa Ujung. Dalam photo udara yang dibuat tentara Sekutu tahun 1944, Cappa Ujung merupakan lokasi pembuatan perahu. Di daerah ini, masyarakat bekerja sebagai nelayan dan terdapat pelabuhan yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal dari beberapa daerah terutama Samarinda di Kalimantan Timur. Di daerah ini juga terdapat Kampung Sabanga dan Lakasi (sekarang bernama Lakessi). Di sebelah selatan terdapat Kampung Laboekkang (sekarang bernama Labakkang). Di daerah ini masyarakatnya juga bekerja sebagai nelayan. Di daerah ini juga terdapat Kampung Tjappagaloeng (sekarang bernama Cappagalung). Di daerah ini masyarakatnya bekerja sebagai petani. Karena adanya penguasaan lahan oleh Pemerintah Kolonial di pusat kota yang digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan maka penduduk pribumi berpindah ke wilayah sekitar kota atau pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara spasial, zona-zona tersebut terbagi dalam ruang-ruang perkotaan. Berikut adalah peta pembagian zona di Kota Parepare pada periode Kolonial Belanda.

Berdasarkan peta pembagian zona di atas, maka terlihat bahwa zona pertama yang merupakan pusat kota ditempati oleh orang-orang Belanda sebagai pusat pemerintahan

dan keamanan. Hal ini terlihat dengan terdapatnya bangunan perkantoran, tangsi militer, tempat tinggal orang Belanda dan penjara. Di zona kedua merupakan aktivitas perekonomian yang ditempatkan di wilayah yang dekat dari pusat pemukiman orang-orang Belanda sebagai penunjang kebutuhan mereka. Sementara itu, di zona ketiga yang dihuni oleh penduduk pribumi ditempatkan di wilayah pinggiran kota agar aktivitas pemerintahan di pusat kota tidak terganggu.

Dari analisis peta ([gambar 7](#)) dan hasil observasi lapangan kemudian dibandingkan dengan peta pembagian zona pada periode Kolonial Belanda, maka terlihat bahwa di Kota Parepare sekarang tidak lagi memperlihatkan adanya pembagian zona seperti yang tergambar pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemukiman orang-orang Belanda di zona pertama pada masa lalu, telah berubah menjadi pemukiman orang-orang pribumi. Hal ini terlihat pada semua bangunan-bangunan Kolonial Belanda di Kota Parepare yang saat ini telah dihuni oleh penduduk pribumi. Peta tersebut juga menjelaskan bahwa Kota Parepare mengalami perkembangan dari periode Kolonial Belanda hingga sekarang.

Wilayah pusat Kota Parepare merupakan kekuatan utama untuk mengawasi perlawanan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya bangunan perkantoran, tangsi militer dan kediaman para tentara Belanda. Wilayah ini juga merupakan tempat aktivitas keagamaan dan pendidikan yang ditandai dengan terdapatnya bangunan gereja dan sekolah. Sementara di Kelurahan Ujung Bulu merupakan wilayah pengamanan. Hal ini terlihat dengan terdapatnya bangunan penjara sebagai tempat tahanan para pemberontak.

Berdasarkan peta jaringan jalan, sebaran bangunan Kolonial, kawasan perdagangan dan kawasan pemukiman pribumi, tergambar jelas bahwa format Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh



**Gambar 7.** Peta jaringan jalan dan sebaran bangunan Kolonial Belanda di Kota Parepare (Sumber: Dokumentasi Muhajir, 2017).

pertimbangan keamanan, baik keamanan jantung Kota Parepare sendiri maupun keamanan Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Berdasarkan peta sebaran bangunan dan jaringan jalan, terlihat bahwa jaringan jalan di Kota Parepare pada periode Kolonial Belanda berpola grid (papan catur) yang memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Bagian pusat kota dibagi sedemikian rupa menjadi blok-blok. Ruang-ruang perkotaan dihubungkan oleh jaringan jalan yang memanjang dari utara ke selatan, kemudian dipotong oleh beberapa ruas jalan pendek dari timur ke barat. Secara teoritik, hukum Indies (*law of the Indies*) yang merupakan kebijakan perancangan dan ideologi perencanaan kota di belahan bumi

barat, dijalankan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu kondisi keamanan yang stabil.

## PENUTUP

Dalam lingkup Pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan Tenggara, posisi Kota *Afdeling* Parepare sangat penting terutama dalam stabilitas keamanan di pesisir barat Sulawesi Selatan dan terutama di wilayah Ajattappareng. Untuk fungsi tersebut, Kota Parepare didesain sedemikian rupa. Dari peta jaringan jalan dan letak pusat kota, tergambar jelas bahwa stabilitas keamanan menjadi prioritas utama dengan mempertimbangkan aspek geografisnya sebagai kota pelabuhan yang berada di Teluk Parepare. Ada tiga jalan utama, masing-masing satu akses menuju ke

Barru di selatan, Pinrang di utara, dan Sidenreng timur. Ketiga jalan ini terakses ke jantung kota yang didesain dilengkapi dengan fasilitas militer.

Dalam lingkup Kota Parepare, diberlakukan model tiga kawasan yaitu kawasan inti yang dicirikan oleh fasilitas militer, jalan berpola bergrid, pasar dan pelabuhan, kawasan luar inti kota yang dicirikan oleh areal aktivitas ekonomi sehari-hari yang disebut sebagai kawasan pecinan, dan kawasan pinggiran kota yang didiami oleh penduduk pribumi. Format kota Parepare seperti ini sangat ideal untuk menyangga Makassar sebagai pusat pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

### Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada ketua Prodi dan staf pengajar Arkeologi Unhas yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam proses penulisan sehingga artikel ini dapat rampung. Juga kepada Iswadi, S.S., Staf Pegawai BPCB Sulawesi Selatan atas dukungan moril selama proses penulisan naskah. Tidak lupa kepada teman-teman yang terlibat dalam penelitian, diantaranya Fakhrun, S.S., Khaerun Ansari, S.S., Isbahuddin, S.S., Muhammad Ikram, S.S., dan Afdal Haris, S.S. Terimakasih pula kepada Jurnal Walennae yang telah berkenan menerbitkan naskah ini.

\*\*\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2010). *Struktur Kota Jeneponto Lama Tahun 1904-1942*. Universitas Hasanuddin.
- Handinoto. (2012). Lingkungan ‘Pecinan’ dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial. In *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lendrawati. (2010). *Pemukiman Masa Kolonial di Kota Benteng Kabupaten Selayar*. Universitas Hasanuddin.
- Mahmud, M. I. (2003). *Kota Kuno Palopo, Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi*. Makassar: Masagena Press.
- Makassar SW Celebes Dates 24 Aug. 1945. (1945). Retrieved November 20, 2016, from Special Report No. 80 website: [http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q\\_searchfield=parepare](http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/21?q_searchfield=parepare)
- Mansyur, S. (2002). *Perkembangan Kota Makassar Abad XVII-XIX, Kajian Arkeologi Ruang*. Universitas Hasanuddin.
- Muhajir. (2017). *Tata Kota Parepare pada Masa Kolonial Belanda*. Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Y., & Nur, M. (2017). Ragam Hias pada Makam di Komplek Mesjid Makam Turikale di Maros Sulawesi Selatan. *Kalpataru*, 26(1), 27–36.
- Nur, M. (2018). Transformasi Bentuk Makam Raja-Raja Tanete dari Abad ke-17 hingga Abad ke-20. *Walennae*, 16(1), 55–68.

- Nur, M., & Hasanuddin. (2014). *Kota Maros Masa Kolonial*. Maros: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.
- Nur, M., & Hasanuddin. (2017). Unsur budaya Prasejarah dan Tipo-kronologi Nisan di Kompleks Makam Mattakko, Maros, Sulawesi Selatan. *Arkeologi Papua*, 9(1), 59–70.
- Nurfajriyani. (2007). *Perkembangan Kota Watampone Periode Pemerintahan Lapawawoi Karaeng Sigeri Sampai Periode Pemerintahan Lamappanyukki*. Universitas Hasanuddin.
- Poelinggomang, E. L. (2004). *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan dari Periode Kolonial ke Kemerdekaan Tahun 1905-1960*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, E. L., & Mappangara, S. (2005). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2015*. (2015). Pare-pare: Badan Pusat Statistik Kota Pare-pare.
- Yunus, H. S. (2000). *Struktur Tata ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.